

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA:

KONSEP, TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Sambutan:
Prof. Dr. Emil Salim

Armida Salsiah Alisjahbana
Endah Murniningtyas



Copyright@2018
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan 2, 2018
Diterbitkan oleh Unpad Press
Grha Kandaga, Gedung Perpustakaan Unpad Jatinangor, Lantai I
Jl. Ir. Soekarno km 21 Bandung 45363
Telp. (022) 84288888 ext 3806
e-mail : press@unpad.ac.id / pressunpad@gmail.com
<http://press.unpad.ac.id>
Anggota IKAPI dan APPTI

Tata Letak : Megananda
Desainer Sampul : Ade Maulana

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep,
Target dan Strategi Implementasi / Penulis, Armida Salsiah
Alisjahbana, Endah Murniningtyas ; , --Cet. 2 - Bandung; Unpad
Press; 2018

xviii, 319 h.; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-439-313-7

I. Judul II. Armida Salsiah Alisjahbana

KATA SAMBUTAN

APA-BAGAIMANA SDGs

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 38 tahun 1983 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB membentuk "*World Commission on Environment and Development*" (WCED) yang dipimpin oleh Mrs. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selaku Ketua dan Dr. Mansour Khalid, Menteri Luar Negeri Sudan selaku Wakil Ketua untuk kemudian memilih 21 anggota Komisi yang mencakup wakil-wakil negara berkembang dan negara maju.

Tugas Komisi ini merumuskan "*global agenda for change*", mencakup (1) strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke 21; (2) menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan ekonomi; (3) menyarankan cara yang lebih baik bagi komunitas internasional menanggapi tantangan lingkungan; (4) ikut bantu persepsi bersama mengenai *issue* lingkungan jangka panjang serta langkah tindak yang dibutuhkan mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa-dasawarsa akan datang serta menjelmakan sasaran aspiratif masyarakat dunia.

Selama 1984-1987 komisi berkonsultasi dalam *public hearing* dengan pihak pemerintahan, dunia usaha, kalangan politik, lembaga swadaya masyarakat, penduduk lokal asli (*indigenous*) di berbagai penjuru dunia, sehingga memperoleh gambaran yang cukup representatif

tentang tantangan permasalahan yang dihadapi yang dirangkum dalam laporan WCED: "*Our Common Future*".

Dalam laporan WCED inilah tercetuslah dalam rumusan "*Sustainable Development*", bahwa "*humanity has the ability to make development sustainable -- to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" *Sustainable development* adalah suatu proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun agar serasi konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini. Dan ini pada hakekatnya membutuhkan sebagai prasyarat: kemauan politik yang kuat.

Lima tahun kemudian, setelah laporan WCED "*Our Common Future*" tersebar di dunia, tumbuh usaha mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan menjadi operasional. Berbagai prakarsa berkembang di bidang penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Semuanya bermuara pada Konferensi *United Nations Environment and Development* (UNCED) pada Juni 1992 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, 20 tahun sesudah Konferensi *Summit* Lingkungan Pertama di Stockholm, Swedia, Juni 1972 yang melahirkan lembaga *United Nations Environment Program* (UNEP) berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Konferensi UNCED ini menghasilkan kesepakatan dunia yang pertama: (1) "Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan"; (2) mewujudkan "Agenda 21" Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan; (3) kesepakatan konvensi kerangka Perubahan Iklim; (4) konvensi tentang keanekaragaman hayati; (5) pernyataan konsensus global tentang manajemen, konservasi dan pembangunan berkelanjutan berbagai macam hutan.

Sementara itu di tahun 2000 juga tumbuh berkembang deklarasi *Millennium Development Goals*, usaha 186 negara dipelopori negara-

negara berkembang yang memprihatinkan aspek sosial pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi untuk diwujudkan pula dalam kerjasama global.

Sementara proses ini berjalan, perkembangan politik dunia mencemaskan. Sengketa bersenjata di kawasan Timur Tengah menyeret Amerika Serikat dalam kancah pertikaian. Peristiwa September-11 di tahun 2002 meledak di New York dan menghalau Kesepakatan Pemimpin Dunia mengenai pembaharuan komitmen dunia pada Agenda 21 Pembangunan berkelanjutan, seperti yang sudah disepakati dalam *World Summit on Sustainable Development*, Juni 2002, di Johannesburg, Afrika Selatan.

Cita-cita, program Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Kemiskinan dibawa hanyut oleh pertikaian politik bersenjata yang berkecamuk di Timur Tengah. Sungguhpun begitu, Konferensi Tingkat Tinggi ketiga, juga dijuluki "Rio+20" diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012. Dan menghasilkan dokumen "*The Future We Want*" yang memuat "*common vision*" tentang masa depan yang dicita-citakan dan disertai "*renewing political commitment*" untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kekuatan ide Pembangunan Berkelanjutan yang lahir di tahun 1987 tidak bisa dipatahkan. Suatu generasi baru tumbuh di tahun 2012 di dunia dan Indonesia dan membawa bendera perjuangan menegakkan *Sustainable Development*. Di Indonesia bendera perjuangan Pembangunan Berkelanjutan beralih ke tangan lembaga BAPPENAS, sebagai sumber inspirasi, pengembang konsep dan lembaga koordinasi badan-badan Pemerintahan Indonesia.

Di bawah pimpinan Armida Salsiah Alisjahbana, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (periode 2009-2014) dibantu oleh Endah Murniningtyas, Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan BAPPENAS (periode 2010-2016), perjuangan menegakkan pola Pembangunan Berkelanjutan dilanjutkan dengan tempo yang semakin meningkat.

Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Sirleaf Johnson menjadi *Co-Chairs* dari *High Level Panel of Eminent Persons* yang dibentuk Sekjen PBB untuk memberi masukan tentang Agenda Pembangunan Global pasca 2015. Dan dari sinilah berkembang kemudian gagasan *Sustainable Development Goals* yang juga menampung gagasan *Millennium Development Goals*.

Pada tanggal 25 September, 2015 sebanyak 193 negara sudah mendeklarasikan dan menyepakati Sasaran-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kini memuat pula dimensi *Millennium Development Goals* yang titik-beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di seantero dunia di tahun 2030.

Sustainable Development Goals bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga-tiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 *Sustainable Development Goals* yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Tampak dalam pola pendekatan *Sustainable Development Goals* agar pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam konteks sosial masyarakat dan semua ini kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masing-masing pilar turut mempengaruhi perkembangan pilar lainnya dalam hubungan serasi, utuh, lestari dan berlanjut.

Manfaat pendekatan *Sustainable Development Goals* yang kini juga memuat sasaran *Millennium Development Goals*, bahwa hasilnya terukur, sehingga kita keluar dari "konsep abstrak idiil" untuk masuk "konsep konkrit dan riil", yang kemudian bisa dikaji tingkat ukurannya. Semua tertuju pada sasaran akhir mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 ketika "*no one left behind*."

Bagaimana isi konsep dan cara praktek pelaksanaannya di lapangan dimuat secara komprehensif dalam buku "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi" yang ditulis oleh para konseptor dan penanggung-jawab *Sustainable Development Goals* untuk Indonesia, Armida Salsiah Alisjahbana bersama dengan Endah Murniningtyas dan kini sejak 2016 sudah pensiun dari jabatan Bappenas.

Satu generasi baru telah bangkit. Bagi mereka inilah buku ini tertuju untuk meneruskan ikhtiar Pembangunan Berkelanjutan mengejar tercapainya sekaligus sasaran pembangunan yang ditopang oleh dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup mencapai masyarakat yang bebas dari kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan di tahun 2030.

Jakarta, 29 Maret 2018.

Emil Salim.

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human wellbeing*. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.

Kemuliaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagian diperlambangkan dalam 17 Tujuan atau *Goals* yang terukur untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk memperhatikan keterkaitan (*interlinkages*) antar ke 17 Tujuan, dan saling ketergantungan antar 167 Target yang diukur melalui 241 indikator dan dengan memperhatikan bahwa alam dan seisinya adalah pembatas kelangsungan kehidupan.

Buku dengan judul “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi” disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami kompleksitas konsep serta tantangan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Buku ini menjelaskan tentang hubungan SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing Tujuan dan Target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didukung oleh Pilar Tata Kelola. Buku ini juga menjelaskan tentang Strategi pelaksanaan SDGs, termasuk Strategi Pelaksanaannya di Indonesia.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada SDGs Center, Universitas Padjadjaran, khususnya kepada para pihak yang telah banyak membantu: Aisyah A. Ghina, Nirwan Maulana, Megananda, Ade Maulana dan Wiartini Citrasari, serta kepada rekan Profesor Arief Anshory Yusuf dan Dr. Zuzy Anna, Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran.

Harapan kami, buku ini dapat digunakan secara luas oleh siapa saja, sehingga semakin banyak parapihak yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Selain itu, Buku ini dapat dijadikan bahan referensi perkuliahan mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Program Studi S1 maupun S2 di Ilmu-ilmu Sosial dan Kebijakan Publik. Semoga Buku ini berkontribusi bagi penyebaran pemahaman dan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk kemaslahatan bersama.

Bandung dan Purwokerto, 22 Maret 2018

Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR KOTAK	xvii
BAGIAN I LATAR BELAKANG DAN SEJARAH	1
1 Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs	2
1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan yang Dihasilkan	2
1.2 Perjalanan Panjang Pembangunan Berkelanjutan	7
1.3 Keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global <i>Addis Ababa Plan of Action</i> dan <i>Paris Climate Agreement</i>	14
2 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia: Pencapaian dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa	21
2.1 Ringkasan Pencapaian 15 Tahun Pelaksanaan MDGs	22
2.2 Strategi Implementasi MDGs	33
2.3 Pembelajaran dari MDGs	38
2.4 Pekerjaan Rumah yang Tersisa	40
BAGIAN II – KONSEP, INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KESIAPAN NEGARA-NEGARA	43
3 Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	44
3.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perbedaan dengan Pembangunan Sebelumnya	44

3.2	Beberapa Keraguan terhadap Pembangunan Berkelanjutan	51
3.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	58
4	Indikator Pencapaian SDGs	72
4.1	Proses Penyusunan Indikator SDGs	72
4.2	Indikator SDGs	74
4.3	Indikator: Mengukur Kemajuan untuk Perbaikan Pelaksanaan SDGs	77
5	Kesiapan Negara-Negara dalam Pelaksanaan SDGs	79
5.1	SDGs dan Kesiapan Negara-negara	79
5.2	Perkembangan Pelaksanaan SDGs	83
5.3	Kesiapan dan Persiapan yang Dilakukan Indonesia	86
BAGIAN III FOKUS AREA MENURUT PILAR SOSIAL - EKONOMI - LINGKUNGAN DAN TATA KELOLA		97
6	Pembangunan Manusia	98
6.1	Berbagai Pendekatan Pembangunan Manusia	98
6.2	Pembangunan Manusia dalam SDGs dan <i>Goals</i> yang Terkait	107
6.3	Bagaimana Indonesia Menyikapi Pembangunan Manusia untuk SDGs?	120
7	Ekonomi Hijau	124
7.1	Pengertian Ekonomi Hijau	124
7.2	Keraguan (<i>Scepticism</i>) terhadap Ekonomi Hijau	131
7.3	Praktek Ekonomi Hijau dalam Kerangka SDGs	140
7.4	Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia	152
8	Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	163
8.1	Lingkungan Hidup dan Cakupannya	164
8.2	Pembangunan Lingkungan Hidup dan <i>Biodiversity</i> di dalam SDGs	168
8.3	Pembangunan Lingkungan Hidup dan <i>Biodiversity</i> di Indonesia	180

9	Institusi dan Tata Kelola untuk SDGS	188
9.1	Institusi dan Tata Kelola sebagai Bagian Terintegrasi dari SDGs	188
9.2	Faktor Manusia sebagai Penentu Institusi dan Tata Kelola yang Baik	191
9.3	Target untuk Institusi dan Tata Kelola dalam SDGs	194
9.4	Pengembangan Institusi dan Tata Kelola untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	196
	BAGIAN IV STRATEGI PENCAPAIAN SDGs	199
10	Reorientasi Fokus Pencapaian SDGs Indonesia	200
10.1	Agenda Pembangunan yang Belum terselesaikan	200
10.2	Tantangan dan Peluang Pembangunan Jangka Menengah	215
10.3	Sembilan Fokus Area SDGs Indonesia	224
11	Pentingnya Pendekatan Holistik dan Terintegrasi	226
11.1	SDGs dalam Pendekatan Holistik dan Terintegrasi	226
11.2	Keterkaitan Tujuan SDGs Melalui Keterhubungan antar Target	229
11.3	Target Inti (<i>Core</i>) dan Target Ikutan (<i>Extended</i>)	235
11.4	Catatan untuk Pendekatan Keilmuan (<i>Scientific Approach</i>) terhadap SDGs	238
12	Pemenuhan Syarat Cukup dan Perlu	241
12.1	Syarat Cukup dan Perlu (<i>Necessary and Sufficient Conditions</i>)	241
12.2	Kebijakan dan Program Pengungkit	244
12.3	Ketersediaan Pendanaan, Kerjasama dengan Swasta serta Peluang Kerjasama Pembangunan Global	246
	BAGIAN V TANTANGAN KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI	249
13	Reformasi Kelembagaan SDGs di Tingkat Global	250
13.1	SDGs dan Paradigma Baru Pembangunan di Tingkat Global	250
13.2	Perubahan Tatanan Pembangunan di Tingkat Global	254

13.3	Implikasi Terhadap Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (<i>United Nations Development System</i>)	257
13.4	Arah Reformasi Sistem Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDS)	259
14	Kelembagaan Implementasi SDGs di Indonesia	266
14.1	Kelembagaan SDGs Indonesia	266
14.2	Format Tim Koordinasi Nasional SDGs: Partisipatif dan Inklusif Seluruh Pemangku Kepentingan	268
14.3	Tantangan Pelaksanaan dengan Kelembagaan SDGs	270
15	Mengintegrasikan SDGs ke Dalam Rencana Pembangunan	274
15.1	Tujuan dan Manfaat <i>Mainstreaming</i>	275
15.2	Proses <i>Mainstreaming</i> SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional	276
15.3	Tindak Lanjut Pelaksanaan SDGs	283
16	Pentingnya Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	287
16.1	Pelibatan Semua Pemangku Kepentingan dalam Merealisasikan SDGs	287
16.2	Langkah Indonesia Mengelola Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	289
16.3	Perkembangan Aktivitas Masing-masing <i>Platform</i> Parapihak	293
	DAFTAR SINGKATAN	297
	DAFTAR PUSTAKA	304
	INDEKS	309
	TENTANG PENULIS	318

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian 15 Tahun MDGS di Indonesia	27
Tabel 2.2	Strategi Implementasi MDGs di Indonesia Berdasarkan Tujuan	33
Tabel 2.3	Agenda yang Tersisa Berdasarkan Tujuan	41
Tabel 3.1	17 <i>Goals</i> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	61
Tabel 4.1	Jumlah Indikator setiap Goal dalam SDGs	74
Tabel 5.1	Skor Negara-negara dalam Pencapaian SDGs	82
Tabel 5.2	Capaian Goal 1. Penurunan Kemiskinan dalam Berbagai Bentuk	86
Tabel 6.1	Target untuk Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	110
Tabel 6.2	Target untuk Tujuan 2. Tanpa Kelaparan, Ketahanan Pangan, Nutrisi dan Pertanian Berkelanjutan	112
Tabel 6.3	Target untuk Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	115
Tabel 6.4	Target untuk Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	117
Tabel 6.5	Target untuk Tujuan 5. Kesenjangan Gender	119
Tabel 7.1	Perbandingan Pandangan Dunia tentang Keberlanjutan dan Prinsip Dasar serta Prioritasnya	126
Tabel 7.2	Target untuk Tujuan 7. Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Modern dan Berkelanjutan	142
Tabel 7.3	Target untuk Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak	144

Tabel 7.4	Target untuk Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Tahan, Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Menumbuhkan Inovasi	146
Tabel 7.5	Target untuk Tujuan 10. Penurunan Kesenjangan Dalam dan Antar Negara	148
Tabel 7.6	Target untuk Tujuan 17. Tata Cara Pelaksanaan dan Kemitraan Global	150
Tabel 7.7	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan Industri Hijau	155
Tabel 8.1	Target untuk Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	169
Tabel 8.2	Target untuk Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berdaya Tahan dan Berkelanjutan	171
Tabel 8.3	Target untuk Tujuan 12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	173
Tabel 8.4	Target untuk Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	175
Tabel 8.5	Target untuk Tujuan 14. Ekosistem Laut	177
Tabel 8.6	Target untuk Tujuan 15. Ekosistem Daratan	178
Tabel 9.1	Target untuk Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	195
Tabel 9.2	Sasaran Utama, Arah Kebijakan dan Program untuk Pencapaian Goal 16	197
Tabel 10.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (Persen)	207
Tabel 10.2	Perkembangan Angkatan Kerja, Lapangan Kerja dan Pengangguran (juta orang)	208
Tabel 10.3	Perkembangan opini Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012-2016	215
Tabel 11.1	Keterkaitan antar Tujuan dari SDGs Melalui Target	232
Tabel 11.2	Target Inti (<i>Core</i>) dan Target Ikutan (<i>Extended</i>): Contoh dari Tujuan 3	236

Tabel 15.1	Kesesuaian antara SDGs dengan Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	278
Tabel 15.2	Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	281

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peningkatan Sampah telah Merusak Lingkungan	4
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 – SDGs	11
Gambar 1.3	Net ODA/GNI pada tahun 2016	17
Gambar 1.4	Persentase Emisi Gas Rumah Kaca Global	19
Gambar 3.1	Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Internalisasi Aspek Lingkungan ke dalam Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi	45
Gambar 3.2	Pengelompokkan SDGs ke dalam Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan	64
Gambar 3.3	Pengembangan <i>Goals</i> MDGs ke dalam SDGs	69
Gambar 3.4	<i>Goals</i> Baru dalam SDGs	69
Gambar 5.1	Pencapaian Skor SDGs Indonesia menurut SDSN	93
Gambar 6.1	Pendekatan Kapabilitas dalam Meningkatkan Modal Manusia	100
Gambar 6.2	<i>Rates of return</i> terhadap Investasi Modal Manusia	103
Gambar 6.3	Proses <i>Continuum of Care</i> Kesehatan Individu	105
Gambar 6.4	Strategi Pembangunan Nasional	121
Gambar 7.1	Perkiraan Bank Dunia tentang Nilai Kerugian Kebakaran Hutan Tahun 2015	135
Gambar 7.2	Target Penyediaan Energi Primer EBT (Energi Baru dan Terbarukan) Tahun 2025	160
Gambar 8.1	Goal SDGs dan Keterkaitannya	167
Gambar 9.1	Tata Kelola yang Baik sebagai Pilar IV dari SDGs	190

Gambar 9.2	Institusi, Tata Kelola sebagai Bagian terintegrasi dari SDGs	191
Gambar 10.1	Penduduk Miskin di Indonesia 2000-2017 (Persen)	202
Gambar 10.2	Prevalensi Balita dengan Status Pendek dan Sangat Pendek, Kurus dan Sangat Kurus, Gizi Kurang dan Buruk (Persen)	203
Gambar 10.3	Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (per 1.000 kelahiran)	204
Gambar 10.4	Angka Partisipasi Murni SMP, SMA, PT (Persen)	205
Gambar 10.5	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran (Persen)	207
Gambar 10.6	Rasio Gini Tahun 2002 - 2017	209
Gambar 10.7	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum dan Sanitasi Layak	210
Gambar 10.8	Luas Kawasan Konservasi Laut	211
Gambar 10.9	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2011-2016	212
Gambar 10.10	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	213
Gambar 10.11	Perkembangan Penanganan Korupsi oleh KPK	214
Gambar 11.1	SDGs sebagai suatu Jaringan (<i>Network</i>) antar Target	228
Gambar 11.2	Keterkaitan antar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Target	231
Gambar 11.3	Keterkaitan antara Tujuan (Goal) 10 (Kesenjangan) dengan Tujuan (<i>Goals</i>) Lainnya	234
Gambar 11.4	Keterkaitan antar Target Menurut ICSU-ISSC <i>Scientific Review of SDGs</i>	240
Gambar 14.1	Struktur Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	270
Gambar 16.1	Empat <i>Platform</i> Pemangku Kepentingan SDGs	291

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.1	Berbagai Gangguan Kesehatan karena Buruknya Kualitas Lingkungan	5
Kotak 1.2	Perjalanan Kesepakatan Global: Dari Stockholm, Rio, ke Johannesburg	9
Kotak 3.1	Perkiraan Persentase Jasa Ekosistem terhadap GDP dan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin	47
Kotak 4.1	Sembilan (9) indikator yang digunakan dalam beberapa target SDGs	73
Kotak 5.1	Petikan <i>Summary</i> dari <i>Voluntary National Review</i> SDGs 2017	94
Kotak 6.1	Keterkaitan Tujuan 2. Tanpa Kelaparan dengan Tujuan lain dalam SDGs	112
Kotak 6.2	Keterkaitan Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Tujuan lain dalam SDGs	114
Kotak 7.1	Keterkaitan Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau dengan Tujuan lain dalam SDGs	141
Kotak 7.2	Dampak Penggunaan Pestisida pada Lingkungan	155
Kotak 7.3	2.700 Petani Sawit Swadaya Sumsel Raih Sertifikat RSPO	158
Kotak 7.4	Sumut Listrik Daerah Terpencil Pakai PLTS	161
Kotak 8.1	Keterkaitan pelaksanaan Goal 14. Ekosistem Laut dengan Goal SDGs lainnya	176
Kotak 8.2	Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia	181
Kotak 8.3	Mitigasi dan Cegah Emisi, Puluhan Ribu Pohon Ditanam di Gunungkidul	183

Kotak 8.4	<i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan</i> 2015-2020	185
Kotak 8.5	Sistem Pemantauan Kapal Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Perikanan	186

BAGIAN I
LATAR BELAKANG
DAN SEJARAH

Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs

Pembangunan berkelanjutan sudah diperkenalkan sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Namun demikian, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan memerlukan waktu lama untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan. Baru-baru ini dengan lahirnya Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan. Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan, Bab ini akan diawali dengan keberhasilan pembangunan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang perjalanan panjang pembangunan berkelanjutan; proses penyusunan SDGs serta keterkaitan SDGs dengan Kesepakatan Global *Addis Ababa Plan of Action* dan *Paris Climate Agreement*.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan yang Dihasilkan

Pembangunan ekonomi secara global telah banyak dicapai oleh banyak Negara. Saat ini jumlah penduduk yang sudah mencapai lebih dari 7 miliar masih mampu dihidupi oleh rata-rata Negara di dunia. Pada tahun 1970 rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia adalah sebesar 4,36% dan mampu menghidupi 3,76 miliar penduduk dunia

(Bank Dunia).¹ Pertumbuhan ekonomi memasuki abad ke-21, masih dapat ditingkatkan dan dipertahankan oleh Negara berkembang. Cina pada tahun 2000 tumbuh sebesar 8,5% dan menghidupi 1,26 miliar penduduknya (1970= 818 juta, tumbuh 19,3%; 1982 baru menyentuh 1,008 miliar). Perekonomian India pada tahun yang sama tumbuh sebesar 3,84% dan menghidupi 1,053 miliar penduduknya (1970= 553 juta), tumbuh 5,16%; 1982 tumbuh 3,84% penduduknya baru menyentuh 730 juta, kemudian menyentuh 1 miliar tahun 1998). Indonesia pada tahun tersebut tumbuh sebesar 4,92% dan menghidupi 211,5 juta penduduk (1970: perekonomian tumbuh 7,55% dengan penduduk 144 juta; 1982 perekonomian hanya tumbuh 2,25%, penduduk 154 juta).

Di sisi lain pembangunan sosial khususnya dengan dorongan melalui MDGs, telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrim di dunia sebanyak 915 juta orang, dari sebanyak 1,75 miliar orang pada tahun 1999 menjadi 836 juta pada tahun 2015, pada akhir pelaksanaan MDGs.² Meskipun penurunan jumlah penduduk ekstrim berlangsung lambat pada awal pelaksanaan MDGs, namun prestasi ini patut kita syukuri, mengingat MDGs dinilai sebagai agenda global yang bersifat *top down* yang disusun oleh PBB. Dalam pelaksanaan MDGs, Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan berdasarkan PPP USD 1/kapita/hari (indikator kemiskinan global), dari 20,6 persen pada tahun 1990 (tahun dasar) menjadi 5,9 persen pada akhir tahun 2015, lebih dari target yang digariskan dalam MDGs "*halving extreme poverty*". Namun, Indonesia tidak berpuas diri, karena apabila diukur menggunakan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia baru menurun dari 15,1 persen pada tahun 1990, menjadi 11,22 persen pada tahun 2015.

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun jumlah orang miskin secara absolut di dunia pada tahun 2015 masih sebanyak 836 juta

¹ *World Development Indicators*, World Bank 2016. (www.databank.worldbank.org)

² *The Millennium Development Goals Report 2015*, The United Nations, New York 2015.

orang. Kesenjangan kesejahteraan diantara masyarakat masih nampak nyata. Di Negara berkembang, anak dari 20% keluarga termiskin menyandang masalah *stunting* berjumlah dua kali lebih besar dibanding anak pada 20% keluarga terkaya. Di perdesaan sebanyak 16% penduduk tidak menikmati air bersih, sementara di perkotaan hanya 4% yang tidak menikmati air bersih. Selain itu, 50% masyarakat desa tidak memiliki fasilitas sanitasi, sementara di perkotaan hanya 18% masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi.³ Di Indonesia jumlah orang miskin pada tahun yang sama adalah sebesar 28,59 juta orang.⁴ Jumlah masyarakat di perkotaan yang memiliki akses air bersih adalah sebesar 75,29%, sementara di perdesaan hanya sebesar 68,81%. Sementara layanan fasilitas sanitasi di perkotaan sebesar 76,82% dan di perdesaan hanya sebesar 55,55%.⁵



Sumber: 2016 Annual Report: Empowering People to Protect the Planet, UNEP

Gambar 1.1 Peningkatan Sampah telah Merusak Lingkungan

³ *The Millennium Development Goals Report 2015: Summary. The United Nations*, New York 2015

⁴ Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015, Badan Pusat Statistik (BPS)

⁵ *Executive Summary Fifteen Years MDGs Achievement in Indonesia (2000-2015)*, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), Jakarta 2016

Selanjutnya, pembangunan dan kegiatan masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan hidup dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh buruknya kualitas lingkungan hidup. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular (Kotak 1.1). Bagi Indonesia, keadaan ini mengancam kesehatan generasi muda yang akan menjadi tumpuan potensi bonus demografi yang dialami Indonesia sejak tahun 2012.

Kotak 1.1 Berbagai Gangguan Kesehatan karena Buruknya Kualitas Lingkungan

<i>Major environmental risk factors with quantifiable disease impacts</i>	<i>Diseases with an important environmental contribution</i>
<i>Unsafe water and sanitation, poor hygiene. This environmental hazard is estimated to kill nearly 1.7 million people annually, largely as a result of a range of waterborne diseases, including diarrhoeal diseases.</i>	<i>Diarrhoeal diseases. Some 94% of the 1.8 million annual deaths from diarrhoeal disease is attributable to environmental causes, particularly unsafe drinking-water and inadequate sanitation.</i>

<p>Indoor pollution. Associate with solid fuel use, mostly in poor countries. Globally 1.5 million people died from diseases caused by indoor air pollution in the year 2002.</p>	<p>Lower respiratory infections. Over 1.5 million deaths annually from lower respiratory infections (41% of the LRI disease burden) are attributable to environmental factors, largely associated with exposure to indoor smoke from solid fuels and outdoor (ambient) air pollution.</p>
<p>Urban air pollution. Estimated to kill about 800 thousands every year. Elevated levels of fine particulates in ambient air – typically emitted by vehicles, industry and energy generation – are associated with increases in daily and long-term premature mortality due to cardiopulmonary diseases, acute respiratory infections and cancers.</p>	<p>Vector-borne diseases. Over 500 thousand deaths annually, or 42% of the global disease burden from malaria, are attributed to modifiable environmental factors such as poorly-designed irrigation and water systems; poor housing and settlement siting; deforestation and ecosystem change/degradation.</p>
<p>Climate change. Causes an estimated 150 thousands excess deaths annually, as well as injuries, from more extreme weather events such as heat-waves, floods and droughts; impacts on regional food production; and changed transmission patterns of vector-borne and other infectious diseases.</p>	<p>Road-traffic injuries. An estimated 467 thousand deaths from traffic injuries, or about 40% of the total annual disease burden from traffic injuries, is attributable to environmental factors, e.g. transport and land-use designs that expose pedestrians and cyclists to excessive risks.</p>
<p>Lead exposure. Contributes to both childhood mental retardation and cardiovascular diseases associated with high blood pressure, together causing a loss almost 13 million disability adjusted life years (DALYs-a combined measure of morbidity and premature mortality) annually, or nearly 1% of the global burden of diseases.</p>	<p>Unintentional poisoning. Globally it is estimated that 71% of all intentional poisonings, which kill about 350 thousand people annually, are attributable to environmental factors. In developing countries, such poisonings are strongly associated with poor chemical management in agro-industries and occupational settings.</p>

Sumber: World Health Report, 2002.

Kadaan ini mendorong perlunya cara pembangunan yang baru, cara pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people and profit*), dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup (*planet*), sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Inilah yang dimaksud dengan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Perjalanan Panjang Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma pembangunan ini sebetulnya sudah didengungkan sejak lama dengan diakui pentingnya Pembangunan Berkelanjutan sejak KTT Bumi pertama tahun 1972. Selama 40 tahun, Pembangunan Berkelanjutan menjadi perdebatan karena dinilai abstrak (sulit dimengerti dengan indikator terukur), dinilai menghambat pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Perjalanan kesepakatan pembangunan lingkungan yang baik dan keterkaitannya dengan pembangunan di berbagai aspek sudah dilakukan sejak lama. Isu lingkungan pertama kali menjadi agenda internasional dalam pertemuan internasional di Stockholm tahun 1972. Perhatian tentang pentingnya pembangunan lingkungan untuk kesejahteraan manusia telah melahirkan adanya lembaga yang khusus menangani lingkungan hidup, yaitu *the United Nations Environment Programme (UNEP)*. Pentingnya isu lingkungan hidup terus bergulir dan puncaknya adalah lahirnya laporan yang mendasari pentingnya integrasi kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi, baik di tingkat internasional, nasional dan lokal. Laporan ini terkenal dengan sebutan *the Brundtland Report* (Kotak 1.2).

Dari gambaran kondisi lingkungan hidup sebagaimana ilustrasi di atas, dampak lingkungan hidup sudah semakin mengganggu masyarakat. Sejalan dengan kemajuan pengetahuan, pengukuran dampak lingkungan yang dianggap eksternalitas sudah dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur nilai ekonominya. Internalisasi